Pemberdayaan komunitas purna Pekerja Migran Indonesia melalui organisasi berbasis komunitas Forum Warga Buruh Migran

Empowering the community of ex-Indonesian Migrant Workers through community-based organization of Forum Warga Buruh Migran

Rahmat Saleh[1,2,*], Ricardi S. Adnan[1], Aswatini Raharto[2]

[1] Pascasarjana Magister Sosiologi, Universitas Indonesia
[2] Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

*Korespondensi penulis: rahmat.saleh01@ui.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, Community-Based Organisation (CBO) has been admitted as a more successful activity to empower the community than other organisations, such as Non-Governmental Organisation (NGO). This article aims to emphasise how activism of the Forum of Indonesian Migrant Workers or the Forum Warga Buruh Migran (FWBM)*, as a CBO initiated by* Nahdlatul Ulama (NU) *at the grassroots level, works to empower ex-Indonesian migrant workers and their families in their areas of origin. This article used the qualitative methodology of the CBO framework and the perspective of community empowerment with a case study in Cilacap Regency, Central Java. Primary data was collected by in-depth interviews and focus group discussions, while secondary data was collected by literature review. The data was processed using content analysis techniques. This research found that the activism of* FWBM *has been manifested in four holistic community empowerment programmes. Through these programmes, ex-Indonesian Migrant Workers and their families can improve their quality of life. They can be more empowered, economically independent, and wealthier. However, the* FWBM *still has limitations in terms of volunteers and financial resources to support sustainable activities.*

Keywords: Empowerment; ex-Indonesian Migrant Workers; Community-Based Organization; Forum Warga Buruh Migran

ABSTRAK

Organisasi Berbasis Komunitas (*Community Based Organization* - CBO) dinilai lebih berhasil dalam upaya pemberdayaan komunitas dibanding organisasi pembangunan lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Analisis dalam artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana aktivisme Forum Warga Buruh Migran (FWBM)–*sebagai CBO yang diinisiasi oleh Nahdlatul Ulama (NU) di tingkatan akar rumput*–dalam pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia (purna-PMI) dan keluarganya di daerah asal. Data diperoleh dari studi kasus di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan pendekatan kualitataif menggunakan kerangka pemikiran CBO dan pemberdayaan komunitas. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion*, sedangkan data sekunder melalui telaah pustaka. Pengolahan data menggunakan teknik analisis konten. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme FWBM dimanifestasikan dalam empat bidang program pemberdayaan komunitas dengan pendekatan holistik. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan dengan baik. Hal ini dapat dipahami dari meningkatnya kemampuan para purna-PMI dan keluarganya untuk memperbaiki kualitas kehidupannya agar bisa lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Namun, FWBM masih menghadapi keterbatasan, utamanya terkait sumber daya manusia (relawan) dan finansial (pendanaan) untuk mendukung aktivitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pemberdayaan; Purna Pekerja Migran Indonesia; Organisasi Berbasis Komunitas; Forum Warga Buruh Migran

DOI: 10.14203/jki.v17i2.754
Naskah masuk: 14 Juli 2022 Revisi akhir: 6 Oktober 2022 Naskah diterima: 8 Desember 2022
ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2022 National Research and Innovation Agency
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0).

PENDAHULUAN

Studi-studi tentang organisasi dalam kaitannya dengan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah banyak dilakukan. Namun, kajian yang ada hanya berfokus pada peran sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Andayani & Pahlawan, 2017; Kristanti, 2021; Raharto & Noveria, 2012; Sumardiani, 2014; Wahyono, 2007; Wahyudi & Jusoh, 2016). Selain itu, studi terkait topik ini kebanyakan menekankan aspek pelindungan bagi PMI pada tahap pra-keberangkatan, keberangkatan, perjalanan menuju negara tujuan/transit, dan selama bekerja di negara tujuan. Di satu sisi, ada anggapan yang semakin meluas bahwa LSM telah kehilangan kekuatannya sebagai organisasi pembangunan lokal tingkat akar rumput (Banks & Hulme, 2012; Streeten, 1997). Di sisi lain, negara dinilai belum optimal dalam memenuhi hak sosial-ekonomi warga, sehingga mendorong tumbuh kembangnya organisasi berbasis komunitas (*Community Based Organization - CBO*). Dapat dikatakan, masih jarang penelitian yang mencermati CBO dengan fokus utama pada aspek pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal.

Sejumlah studi telah mengungkapkan pentingnya peran dan kontribusi CBO di sebagian besar negara berkembang dalam pembangunan melalui pemberdayaan, baik di tingkat regional, nasional, maupun lokal. UN-Habitat (2008) mencatat CBO telah muncul di Asia dan wilayah lainnya setidaknya selama dua dekade terakhir dan perannya menjadi kuat dalam kontribusi pembangunan di tiap negara saat ini. Menurut Clark (1999, dalam Njuguna, 2013), CBO merupakan organisasi tingkat bawah (*grassroots organization*) yang tidak mencari keuntungan dan bertujuan untuk memberdayakan kelompok penduduk yang kurang beruntung pada populasi tertentu. Meskipun CBO memiliki cakupan yang kecil dan bersifat informal, organisasi ini menyediakan berbagai layanan terhadap pembangunan masyarakat. Studi Prihatiningsih dan Astuti (2019) juga menunjukkan cara kerja CBO yang berkontribusi dalam pembangunan, antara lain melalui program pemberdayaan ekonomi, psikologi, hukum, sosial, budaya, dan politik. Namun, CBO juga seringkali mengalami kendala seperti sumber pendanaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya (Kwok dkk., 2015). Kondisi ini berbeda dengan LSM yang cenderung memiliki lebih banyak akses terhadap sumber pendanaan dan didukung oleh SDM yang mumpuni. Hal ini dapat dipahami karena memang terdapat perbedaan antara CBO dengan LSM. CBO merupakan individu-individu dalam suatu kelompok/komunitas di ruang lingkup wilayah geografis tertentu yang kecil dengan SDM yang terbatas (lokal) (Dumi dkk., 2014). Oleh karena itu, seringkali beberapa aktivitas program atau kegiatan CBO tidak dapat diakui dan tidak dapat diintegrasikan ke dalam 'sistem formal' program pemerintah. Pada saat yang bersamaan, di beberapa kota yang pemerintahnya mengakui adanya LSM, lembaga ini akan memberikan bantuan teknik dan keuangan kepada CBO untuk pengembangan program pemberdayaan komunitas (Bennet dkk., 1999, dalam Suhartono, 2005).

Mencermati kompleksnya permasalahan yang dihadapi para purna-PMI, penelitian tentang peran CBO dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal, penting untuk dilakukan. Sebagai contoh, permasalahan yang sering dialami purna-PMI adalah perubahan aktivitas ekonomi dan sosial sepulangnya ke tanah air, serta perubahan pola hidup yang cenderung konsumtif bahkan hedonis. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya keterampilan dalam pemanfaatan hasil kerja (remitansi) yang mereka peroleh untuk kegiatan/usaha ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Bank Indonesia (2021) mencatat total remitansi PMI mencapai US$ 9,43 miliar atau setara dengan 133 triliun rupiah pada tahun 2020. Angka remitansi ini tidak termasuk pengiriman dana dari PMI melalui jalur nonperbankan atau pola tradisional yang masih berlaku, misalnya, uang yang dibawa langsung oleh PMI atau uang yang dititipkan temannya yang pulang ke Indonesia. Sayangnya, besarnya aliran remitansi tersebut biasanya digunakan sebagai aliran searah saja (Goldring, 2004; Levitt & Lamba-Nieves, 2011). Dengan kata lain, remitansi hanya digunakan untuk

kebutuhan ekonomi keluarga dan pembangunan fisik rumah di daerah asal tanpa adanya perencanaan pemanfaatan untuk keberlangsungan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kondisi ini semakin parah karena belum adanya program yang signifikan dari pemerintah mengenai pengelolaan remitansi bagi PMI, termasuk purna-PMI (Migrant CARE, 2021).

Menurut Mentari dan Fatimah (2021), perubahan pola hidup purna-PMI sedemikian rupa menyebabkan apa yang telah mereka hasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk jangka waktu yang panjang. Setelah hasil yang diperoleh habis, purna-PMI harus mencari cara lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya, bekerja serabutan, menjadi buruh tani, ataupun mencoba peruntungan ke kota besar untuk menjadi buruh pabrik atau asisten rumah tangga. Mereka juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan lagi di daerah asal karena peluang kerja yang tersedia sangat terbatas. Keberadaan mereka malah menambah jumlah pengangguran dan menempatkan rumah tangga pekerja migran di daerah asal dalam siklus migrasi yang tidak berkesudahan (Cohen dkk., 2005, dalam Dewayanti, 2010). Dengan kata lain, tidak sedikit purna-PMI memilih untuk kembali bekerja ke luar negeri dan hidup berpisah dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Hal ini tentu saja berdampak terhadap pola asuh anak, ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian karena *long distance relationship*. Secara moral, kondisi demikian menggerakkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjalankan perannya dalam bidang sosial-kemanusiaan.

Hasil Muktamar NU XXVII di Situbondo pada tahun 1984 menegaskan bahwa NU kembali ke khittah, yakni menjalankan peran sosial-kemanusiaan, pendidikan, keagamaan, dan membangun demokrasi (demokratisasi). Dalam menjalankan peran sosial-kemanusiaan, NU–melalui pesantren serta lembaga-lembaga/badan-badan ke-NU-an seperti Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH), lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lakpesdam), dan Fatayat–melakukan upaya advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat/komunitas lokal (Ekawati, 2016). Jaringan NU mulai dari tingkat global, regional, nasional (provinsi, kabupaten/kota), sampai dengan lokal (kecamatan hingga ke pelosok pedesaan) merupakan kekuatan (*capital*) yang besar. Misalnya, NU Kabupaten Cilacap melaksanakan instruksi dari tingkat pusat (dari PBNU), tingkat kabupaten, hingga tingkat desa di Kabupaten Cilacap.

Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap memiliki fokus pada program pemberdayaan dan pendampingan PMI, termasuk purna-PMI (NU Online, 2018). Pada tahun 2011, Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap bersama Tifa *Foundation* membentuk organisasi berbasis komunitas CBO Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai wadah untuk pelaksanaan program pemberdayaan mantan buruh migran di daerah asal Cilacap. Sebanyak 30 desa menjadi anggota FWBM yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala (Octaviani, 2015). Namun, Windiasih dan Sugito (2019) mengungkapkan bahwa para anggota FWBM belum sepenuhnya memahami aturan hukum perburuhan, masih kurang memahami pengelolaan remitansi, dan belum adanya kesempatan yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Perencaaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) guna menghasilkan program pembangunan desa yang mendukung kewirausahaan para anggota FWBM. Dengan demikian, FWBM pada konteks organisasi berbasis komunitas CBO semakin penting peranannya dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal (di desa).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan melalui kerangka pemikiran CBO (Chechetto-Salles & Geyer, 2006) dan pemberdayaan komunitas (Ife & Tesoriero, 2006/2016). Pertanyaan tersebut adalah bagaimana upaya-upaya (aktivisme) FWBM yang diinisiasi oleh NU pada tingkatan akar rumput, khususnya di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap dalam memberdayakan komunitas purna-PMI,

termasuk dengan keluarganya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi ini didasarkan pada tiga justifikasi. Pertama, NU Kabupaten Cilacap memiliki perhatian yang besar terhadap isu-isu PMI, terutama program-program pemberdayaan purna-PMI. Kedua, Kabupaten Cilacap menempatkan PMI ke luar negeri terbanyak di antara kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dikatakan, Kabupaten Cilacap merupakan 'lumbung terbesar' PMI di Jawa Tengah, salah satunya di Desa Danasri Kidul, Kecamatan Nusawungu. Ketiga, di Desa Danasri Kidul tersebut juga banyak purna-PMI yang tergabung dalam FWBM.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif dipandang paling tepat untuk melihat, menjelaskan, mengetahui, mendeskripsikan, menginterpretasikan proses dan makna secara autentik (*authentic interpretations*) dalam studi kasus (*examinations of cases*) sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian secara lebih mendalam (Neuman, 2007). Oleh karena itu, peneliti melakukan *authentic interpretations* untuk memahami bagaimana aktivisme FWBM di Desa Danasri Kidul, dalam memberdayakan komunitas purna-PMI. Pada konteks penelitian ini, *authentic interpretations* merupakan suatu proses memahami makna 'sedekat mungkin' terhadap dunia riil atau kehidupan nyata dari aktivisme FWBM tersebut.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pokok-pokok bahasan pada wawancara mendalam dan FGD diarahkan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai implementasi berbagai kegiatan pemberdayaan komunitas purna-PMI yang dilakukan oleh FWBM di Desa Danasri Kidul. Penentuan informan melalui *purposive sampling*, artinya, dilakukan dengan sengaja atau bertujuan, berlandaskan pada kedalaman pemahaman yang ingin digali terkait dengan permasalahan penelitian. Selain itu, sumber data berasal secara bergulir dari satu informan ke informan lain yang memenuhi kriteria hingga pada suatu titik tertentu berhenti saat informasi sudah dirasa cukup (*snowball sampling*). Peneliti juga melakukan validasi data melalui triangulasi (*triangulation of data for validation*).

Informan utama dalam penelitian ini yaitu dua orang pegiat FWBM, lima orang purna-PMI dan/atau keluarga PMI yang tergabung di dalam FWBM, serta tiga orang pengurus NU Kabupaten Cilacap. Informan pendukung terdiri dari satu orang aparatur Desa Danasri Kidul, satu orang eks pengurus LSM buruh migran/Tifa *Foundation*, satu orang wartawan/pers lokal Kabupaten Cilacap, satu orang pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap, dan satu orang pegawai satu orang pegawai Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Cilacap. Dengan demikian jumlah informan seluruhnya adalah 15 orang.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juli–September 2021. Oleh karena masa pandemi COVID-19 masih berlangsung pada rentang waktu tersebut, bahkan memasuki "gelombang kedua", serta adanya kebijakan pemerintah mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pelaksanaan wawancara mendalam dan FGD dilakukan secara daring (*online*) dengan memanfaatkan aplikasi teknologi komunikasi, seperti Google Meet, Zoom, dan panggilan video WhatsApp. Peneliti menyadari bahwa pengumpulan data primer secara daring ini menjadi kelemahan tersendiri pada saat peneliti melakukan *authentic interpretations* atas data/informasi yang terkumpul. Di satu sisi, pengumpulan data primer secara daring menjadikan informan lebih nyaman karena tidak khawatir terpapar COVID-19. Di sisi lain, metode ini dapat berimplikasi pada pengamatan peneliti terhadap kesan informan, *interviews/FGD setting, nonverbal information*, seperti *gesture* tubuh dan mimik/ekspresi wajah para informan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan pada rentang waktu yang sama dengan data primer dan

berbasis metode digital menggunakan *summons search engine*, *google scholar*, dan situs pencarian jurnal internasional bereputasi serta jurnal nasional terakreditasi. Pengumpulan data sekunder berupa *literature review* artikel-artikel pada jurnal atau *e-books* yang memuat topik terkait penelitian ini. Hasil pencarian literatur tersebut kemudian dibaca judul dan abstraknya, serta dipilih yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Setelah terkumpul beberapa literatur terpilih, dilakukan analisis.

Teknik analisis data baik data primer maupun sekunder dimulai dengan melakukan organisasi data ke dalam kategori berdasarkan tema, konsep, atau suatu kesamaan/kemiripan tertentu. Proses ini disebut dengan *coding*. Miles & Huberman (1994:56, dalam Neuman, 2014:480–481) menjelaskan bahwa "*codes are tags or labels for assigning units of meaning to the descriptive or inferential information compiled during a study. Codes usually are attached to "chunks" of varying size—words, phrases, sentences or whole paragraphs, connected or unconnected to a specific setting"*. Nama atau label yang diberikan dalam proses *coding* ini didasarkan atas tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian. Proses *data coding* dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *open coding, axial coding, dan selective coding* (Strauss, 1987, h. 55, dalam Neuman, 2014, h. 481–484). Proses *data coding* pada penelitian ini menggunakan matriks untuk membantu peneliti melakukan kategorisasi data. Selanjutnya, peneliti melakukan penajaman analisis konten secara sistematis untuk memahami makna data tersebut. Pada tahap ini, peneliti memberikan interpretasi data. Proses interpretasi sepenuhnya dilakukan oleh peneliti untuk menghindari terjadinya *lack of interpretation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Purna-PMI di Desa Danasri Kidul

Data BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 hingga 2021, jumlah penempatan PMI yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 91.791 orang. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang menempatkan PMI ke luar negeri dalam jumlah terbanyak dibandingkan kabupaten lainnya di provinsi ini, yaitu 31.918 orang. Pada tahun 2018, Kabupaten Cilacap menempatkan 11.785 orang, tahun 2019 sebanyak 11.525 orang, dan tahun 2020 sebanyak 5.175 orang. Jumlah PMI yang ditempatkan cenderung menurun cukup drastis sejak tahun 2020 karena kebijakan penutupan (*lockdown*) perbatasan negara tujuan PMI. Pada tahun 2021, jumlah PMI dari Kabupaten Cilacap sebanyak 3.433 orang (Tabel 1). Data yang dirilis BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021) juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021, jumlah PMI yang kembali ke daerah asal sebanyak 314.389 orang, dan yang terbanyak kembali ke daerah asal di Jawa Tengah yaitu 79.038 orang.

Tabel 1. Data Penempatan PMI Menurut Asal di Lima Kabupaten/Kota Pengirim PMI Terbesar di Jawa Tengah Tahun 2018–2021

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	Total
1	**Cilacap**	**11.785**	**11.525**	**5.175**	**3.433**	**31.918**
2	Kendal	7.812	7.743	4.199	3.501	23.255
3	Brebes	5.995	6.268	2.461	1.344	16.068
4	Banyumas	4.112	3.892	1.619	843	10.466
5	Pati	3.700	3.835	1.628	921	10.084

Sumber: BP2MI (2018; 2019; 2020; 2021), data diolah oleh peneliti

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Cilacap merupakan daerah asal PMI. Kondisi ini, menjadikan Kabupaten Cilacap sering disebut sebagai lumbung PMI. Salah satu kecamatan yang menempatkan PMI bekerja di luar negeri dalam jumlah besar adalah Kecamatan Nusawungu. Kondisi ini tergambar dalam petikan wawancara mendalam dengan informan

dari P4MI dan pegiat FWBM di Kabupaten Cilacap sebagai berikut.

> "*Kalau sekarang sebutan lumbung atau kantong ya(?) Kalau di Cilacap ini kan kebanyakan memang paling tinggi PMI, […] memang minat mereka untuk bekerja di luar negeri sangat tinggi untuk penduduk di Cilacap, baik perempuan maupun laki-laki.*" (EK, 45 tahun, pegawai P4MI Kabupaten Cilacap, Kamis 26 Agustus 2021).

> "*[…] ternyata jumlah TKI di Cilacap itu tidak sedikit. Cilacap ternyata ranking satu di Jawa Tengah. Disebut kantong TKI apa lumbung TKI karena saking banyaknya ya*." (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Merujuk pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*[1] dan *Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration*,[2] proses migrasi PMI dapat dipahami sebagai suatu siklus yang dimulai dari daerah asal (pendaftaran dan persiapan keberangkatan), keberangkatan dan selama perjalanan menuju negara tujuan bekerja, transit (pertukaran moda transportasi), tinggal dan bekerja di negara tujuan selama masa kontrak kerja, sampai kembali lagi ke daerah asal setelah kontrak kerja berakhir. Proses migrasi yang panjang tersebut menandakan bahwa penanganan terhadap permasalahan-permasalahan PMI sangat kompleks karena ada keterkaitan antara tahapan proses migrasi tersebut. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya pada tahap pra-penempatan (sebelum bekerja) dan penempatan (selama bekerja), tetapi juga pasca-penempatan (setelah bekerja). Hal ini tercermin dari permasalahan yang dihadapi oleh PMI yang berasal dari Kabupaten Cilacap baik saat di luar negeri maupun yang sudah kembali ke daerah asal, seperti yang dituturkan oleh informan berikut ini:

> "*[…] banyak kasus pekerja migran yang mendapatkan penganiayaan di luar negeri, entah itu diperkosa, entah itu disiksa, entah itu digaji sedikit, tidak sesuai dengan job. Terus belum lagi kalau proses PMI ketika akan ke luar negeri, ketika dia di luar negeri, ketika dia pulang, luar biasa banyak, menumpuk. Ibaratnya kalau kita lihat bagaikan gunung es. Nah kebetulan di sini [di Desa Danasri Kidul] mengalami.*" (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Mengacu data pengaduan terdokumentasi dari BNP2TKI dan BP2MI yang dirangkum Noveria dkk. (2021), permasalahan yang dialami PMI pada masa selama bekerja ataupun setelah bekerja cenderung terkait dengan permasalahan pada masa sebelum bekerja seperti kurangnya pelatihan kerja, terputusnya komunikasi dengan keluarga di daerah asal, serta pemalsuan dokumen (seperti sertifikat kesehatan, KTP, atau ijazah). Dalam konteks ini, salah satu penyebab terjadinya penyiksaan dapat terkait juga karena kekecewaan majikan terhadap kualitas PMI akibat kurangnya pelatihan kerja pada tahap pra-penempatan.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam dan FGD, Tabel 2 menyajikan gambaran mengenai beberapa kecenderungan tipe purna-PMI dan permasalahannya di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu.

Tabel 2. Tipe Purna-PMI dan Permasalahannya di Desa Danasri Kidul

1	Gaya hidup yang cenderung konsumtif. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, hanya sekadar untuk gengsi. Misalnya membeli perhiasan terbaru, sepeda motor terbaru, TV terbaru, telepon seluler terbaru.
2	Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena tabungan sudah digunakan untuk membangun rumah dan membayar biaya pendidikan anak.
3	Minimnya program/pelatihan yang terkait dengan usaha ekonomi produktif.
4	Minimnya pendampingan terhadap mereka yang mengalami trauma, kasus hukum, dan lain sebagainya.
5	Sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri.

[1] Konvensi ini diadopsi oleh UN melalui General Assembly Resolution 45/158 of 18 December 1990. Namun, konvensi ini baru mulai berlaku pada 1 Juli 2003 setelah jumlah negara yang meratifikasi mencapai 20 negara pada Maret 2003.

[2] https://www.iom.int/global-compact-migration

6	Kembali pada aktivitas menjadi ibu rumah tangga atau pekerja serabutan.
7	Menganggur/tidak bekerja.
8	Kembali bekerja ke luar negeri (kembali menjadi PMI) sebagai pilihan terakhir dan terpaksa berpisah dengan keluarga selama puluhan tahun.

Sumber: Temuan Penelitian (2021)

Tabel 2 menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi para purna-PMI adalah kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan atau pemanfaatan hasil kerja yang mereka peroleh untuk kegiatan/usaha ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tidak hanya dikarenakan minimnya literasi keuangan, tetapi juga minimnya program/pelatihan terkait usaha ekonomi produktif bagi para purna-PMI. Hampir sebagian besar informan peserta FGD mengatakan bahwa mereka seperti memulai kehidupan dari nol dalam bidang ekonomi setelah kembali dari (bekerja) luar negeri. Akhirnya, mereka terpaksa kembali menjadi PMI agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan pegiat FWBM berikut ini.

> "*Kebanyakan masalah pengelolaan keuangan. Yang purna, ketika pulang ke Indonesia sementara di sana terbiasa punya uang dan sebagainya sampai di Indonesia karena memang paradigmanya untuk mendapatkan uang adalah membarter tenaga dan waktu, kerja pada oranglain, maka ketika pulang uangnya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya, untuk beli motor baru, beli tv baru, serba baru motor, mobil, hape, yang sebetulnya belum menjadi sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Nah ini menjadi keprihatinan, sehingga setelah beberapa waktu di rumah akhirnya uangnya habis, cenderung kemudian pergi lagi [kembali menjadi PMI]*" (HS, 40 tahun, pegiat FWBM, Selasa 24 Agustus 2021).

Minimnya literasi keuangan para purna-PMI juga dikarenakan rendahnya latar belakang pendidikan mereka. Hal ini sesuai dengan data sekunder dari P4MI Kabupaten Cilacap (2020) yang menunjukan bahwa mayoritas mereka berpendidikan SD dan SMP, berjenis kelamin perempuan, serta bekerja di sektor informal (*domestic workers*) saat bekerja di luar negeri. Hal ini menempatkan purna-PMI pada kelompok yang rentan, seperti yang diungkapkan oleh informan pegawai P4MI setempat berikut ini.

> "*Jadi kalau untuk di Cilacap yang rentan ini kan biasanya yang [dulu bekerja di sektor] informal dengan pendidikan yang rendah (ke Singapur, Hongkong, Taiwan, Malaysia). Kadang berpikirnya hanya sebatas dia bekerja di luar negeri mendapatkan gaji hanya untuk konsumsi, pendidikan anak, hanya sebatas itu aja. Tapi sesampainya di Indonesia, di daerah asal, tiga sampai empat bulan mereka ya sudah, karena mungkin tabungan sudah habis, akhirnya memutuskan untuk pergi [menjadi PMI] lagi.*" (EK, 45 tahun, pegawai P4MI Kabupaten Cilacap, Kamis 26 Agustus 2021).

Jejak Langkah dan Peran FWBM

Secara keseluruhan, tipe purna-PMI dan permasalahannya di Desa Danasri Kidul dapat dikatakan sebagai salah satu "potret buram" masyarakat Kabupaten Cilacap. Artinya, hal tersebut bukan hanya terjadi pada saat ini atau baru-baru ini saja melainkan sebetulnya sudah berlangsung sejak lama. Oleh karena itu, FWBM yang diinisiasi oleh kader-kader NU Kabupaten Cilacap pada tingkatan akar rumput – RT/RW/dusun – dalam naungan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap senantiasa berupaya untuk memberikan solusi-solusi melalui program pemberdayaan. Pada konteks ini, program pemberdayaan yang dilakukan oleh FWBM dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan (*skill)* para purna-PMI agar dapat melakukan kegiatan/usaha ekonomi yang produktif di daerah asal, khususnya di Desa Danasri Kidul. Dengan upaya ini, purna-PMI di desa tersebut diharapkan bisa lebih berdaya, mandiri, sejahtera, dan tidak kembali bekerja ke luar negeri (kembali menjadi PMI).

FWBM secara "resmi" menerapkan program pemberdayaan bagi para purna-PMI

pada tahun 2011. Sampai saat ini, program tersebut masih berjalan. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk mengajak/mengedukasi para purna-PMI agar mereka mengorganisasikan diri ke dalam sebuah wadah komunitas FWBM. Dibutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang, dimulai sejak sekitar tahun 2002–2003, Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap menginisiasi Forum Warga (FW). Secara sederhana, FW berbentuk kelompok-kelompok sosial/sektoral, misalnya kelompok rembug dusun, pengajian, arisan, lintas agama, peternak, petani, pedagang, dan lain sebagainya. FW tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Di tiap kecamatan tersebut, FW dapat ditemukan di 10 desa, salah satunya di Desa Danasri Kidul.

Salah satu kegiatan rutin FW setiap bulannya adalah 'Diskusi Kampung' (Diskam), yakni sebuah sesi untuk saling bertukar pikiran, mencurahkan isi hati (curhat), dan bahkan menyampaikan pandangan kritis terhadap berbagai pelayanan publik di tingkat desa/kecamatan/kabupaten di Cilacap yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terkait dengan hak-hak masyarakat yang belum tersosialisasikan (belum terpenuhi). Pada tahun 2008, para pegiat FW menyadari adanya beragam permasalahan yang dihadapi oleh para eks buruh migran di desanya, misalnya belum terpenuhinya hak-hak mereka. Dari sini, tercetuslah gagasan dari para pegiat FW tersebut untuk memulai membentuk FW khusus bagi para buruh migran, eks buruh migran, dan keluarganya bahkan calon buruh migran sekalipun (FWBM).

Pada rentang waktu mulai dari 2008 sampai dengan 2010, para pegiat FWBM melakukan pendekatan langsung (*door to door*) untuk mengedukasi para purna-PMI akan pentingnya komunitas eks buruh migran sebagai wadah untuk saling berbagi (*sharing*) cerita atau pengalaman mereka ke masyarakat sekitar. Dalam rentang waktu tersebut, kegiatan FWBM hanya sekadar sesi berbagi cerita atau pengalaman mereka selaku purna-PMI, terutama saat mereka menjadi PMI di luar negeri. Berbagi cerita ini dapat membuka wawasan mereka dan menjadi pertimbangan bagi seseorang yang hendak bekerja di luar negeri (menjadi PMI). Berikut petikan wawancara mendalam dengan pegiat FWBM terkait kondisi tersebut.

> "*Oh ya sangat luar biasa, manis, pahit getir. Kalau diceritakan itu mungkin akan jadi sebuah novel. Ada cerita sedihnya, ada senangnya. Yang jelas kita door to door. Terus kita juga melalui forum-forum NU juga. Itu sangat sulit sekali untuk bisa ngobrol dengan mantan TKI. […] [kami] Terus-menurus door to door untuk merayu mereka karena 'ini lho penting, nanti anak kita jadi TKI lagi. Apa diwariskan terus-menerus di luar negeri? Njenengan sekarang bisa lihat, njenengan ke luar dari luar negeri njenengan kondisinya kayak gini. Apa mau seperti ini terus? Kehidupan ini terus diwariskan? Kita perlu sharing, kita perlu ngobrol biar pengalaman-pengalaman njenengan di sana yang manis yang pahit itu bisa didengar umum'*." (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Pada tahun 2011–bertepatan adanya penawaran program kerja sama dengan Tifa *Foundation* yang didanai oleh *World Bank* – FWBM secara "resmi" dideklarasikan. Namun dalam pelaksanaan program tersebut, Tifa *Foundation* menggunakan istilah CBO (*Community Based Organization*) untuk menyebut FWBM dan istilah CO (*Community Organizer*) untuk menyebut pegiat/koordinator FWBM. CBO ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Nusawungu, Binangun, dan Adipala. Di tiap kecamatan tersebut terdapat CBO di 10 desa, sebagaimana dipaparkan oleh informan pegiat FWBM:

> "*Di 2011 kita deklarasi namanya Forum Warga Buruh Migran (FWBM). Kemudian waktu kita dengan Tifa itu ada istilah CBO dan CO. CBO Community Based Organization itu ya FWBM, CO itu Community Organizer orangnya, koordinatornya. CBO dan CO itu untuk bahasa proyeknya Tifa. […] Tifa itu juga punya program yang arahnya ke situ (pemberdayaan eks buruh migran)*

sehingga kemudian kita mencoba melakukan komunikasi yang akhirnya kemudian kita bisa kerja sama." (HS, 40 tahun, pegiat FWBM, Selasa 24 Agustus 2021).

Adapun karakteristik anggota FWBM yang menjadi subjek garapan FWBM yaitu mayoritas purna-PMI Singapura atau Malaysia, berjenis kelamin perempuan, *low-educated* (SD atau SMP), *eks domestic worker* (*eks* pekerja rumah tangga atau sektor informal), keluarga PMI (suaminya masih bekerja di Malaysia), dan rata-rata usianya berkisar 35-50 tahun. Beberapa informan selaku pegiat FWBM menyatakan bahwa pada dasarnya sasaran program pemberdayaan komunitas FWBM terbuka untuk masyarakat luas (para PMI, purna-PMI, dan keluarganya, bahkan calon PMI sekalipun). Lebih lanjut, jangkauan program pemberdayaan komunitas FWBM berbasis pada kedekatan wilayah domisili atau dusun-dusun (RT/RW) dari para purna-PMI. Hal ini supaya lebih memudahkan dalam berkoordinasi. Namun, basis wilayah domisili ini tidaklah kaku, sebab jika ada purna-PMI yang berbeda wilayah domisili atau dusun, maka boleh saja mereka bergabung.

FWBM sebagai Organisasi Berbasis Komunitas

Organisasi berbasis komunitas atau *Community Based Organization* (CBO) memiliki sebutan yang berbeda-beda di berbagai wilayah, seperti asosiasi pengembangan komunitas (*community development associations*), perkumpulan/kelompok/forum/asosiasi (*societies*), organisasi kesejahteraan (*welfare organizations*), paguyuban-kekerabatan (*neighborhood councils*), dan perhimpunan (*united community*) (Agbola & Tunde, 1998, dalam Ali & Khan, 2015). Namun, Chechetto-Salles dan Geyer (2006) mendefinisikan CBO sebagai organisasi yang menyediakan berbagai pelayanan sosial di tingkat lokal. CBO merupakan organisasi nirlaba (*non-profit organisation*) yang kegiatan-kegiatannya didasarkan terutama pada upaya sukarela. Oleh karena itu, CBO sangat bergantung pada kontribusi kerja-kerja para relawannya dan dukungan material serta keuangan dari donatur. Dapat disimpulkan, karakteristik CBO meliputi (i) berorientasi pada layanan; (ii) bertindak di tingkat lokal; (iii) bersifat nirlaba; dan (iv) berdasarkan kerja-kerja sosial/asas kesukarelaan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kerangka pemikiran CBO sebagai suatu organisasi nirlaba yang terletak dalam komunitas tertentu, keanggotaannya bersifat lokal, aktivitasnya didasarkan pada asas kesukarelaan dengan tujuan bersama/kolektif untuk kesejahteraan komunitas yang bersangkutan.

FWBM bisa dikategorikan sebagai CBO organisasi berbasis komunitas lokal karena FWBM berorientasi pada pelayanan sosial (pemberdayaan) di tingkat lokal. Dapat dipahami bahwa jejak langkah FWBM dibentuk untuk mewadahi tidak hanya bagi para PMI, purna-PMI di daerah asal (di desa/kampung halaman) dan keluarganya, tetapi juga calon PMI. Dalam aktivitasnya, FWBM selalu berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya. Terlebih lagi, aktivisme FWBM didasarkan pada asas kesukarelaan (nirlaba) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Lebih lanjut, Ali dan Khan (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara CBO dan pengembangan komunitas (kesejahteraan komunitas), salah satunya melalui pemberdayaan komunitas. CBO berperan penting dalam mengedukasi dan mendorong penduduk lokal dalam pemecahan masalah. Dalam konteks ini, CBO memiliki kapasitas untuk membantu mereka memilah permasalahan dan menyelesaikannya secara bersama. Demikian juga yang terjadi di FWBM, perumusan program pemberdayaan FWBM berbasis pada apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan para anggotanya. FWBM menyadari sejatinya para anggota komunitaslah yang lebih tahu apa yang dibutuhkannya.

Dapat dikatakan bahwa FWBM mempunyai kapasitas dalam pemberdayaan komunitas purna-PMI. Menurut Mattessich (2009), kapasitas ini disebut sebagai kapasitas sosial yang meliputi kemampuan komunitas dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri. Dengan kata lain,

FWBM pada dasarnya memiliki kemampuan (meskipun masih tampak sederhana dan memiliki keterbatasan) dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya (calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya). Hal ini terbukti dari aktivisme FWBM yang hingga kini masih terus berjalan. Salah satunya di Desa Danasri Kidul yang dalam perkembangannya kemudian tidak hanya dimotori oleh kader-kader Lakpesdam, tetapi juga Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Hingga tahun 2021, anggota FWBM yang merupakan purna-PMI di desa ini sudah mencapai ratusan orang. Situasi ini menunjukkan bahwa FWBM sebagai organisasi berbasis komunitas tidak bisa dikesampingkan. Temuan penelitian ini sejalan dengan Darmajanti (2002) yang menekankan bahwa pelaksanaan pemberdayaan komunitas untuk memperbaiki kondisi kehidupan para anggotanya perlu mempertimbangkan keberadaan organisasi berbasis komunitas yang telah ada, baik dari dinamika berorganisasi, kinerja, maupun jaringan kerja sama.

Program Pemberdayaan Komunitas Purna-PMI di FWBM

Ife dan Tesoriero (2006) menjelaskan bahwa pemberdayaan komunitas artinya menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada para anggotanya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memperbaiki kondisi atau kualitas kehidupannya. Dalam praktiknya, pemberdayaan komunitas sangat berbeda-beda. Banyak program pemberdayaan komunitas yang berupaya membangun dengan fokus hanya pada satu bidang dan mengabaikan bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, pemberdayaan yang berfokus pada bidang pendidikan tetapi mengabaikan bidang ekonomi, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Di sisi lain, banyak juga program pemberdayaan komunitas yang berpijak pada asumsi bahwa dimulai bidang ekonomi, maka bidang sosial lainnya akan mengikuti. Poin pentingnya yaitu pemberdayaan komunitas yang hanya fokus pada satu bidang sudah pasti akan gagal karena didasarkan pada pemikiran linear, bukan pendekatan holistik. Namun, dalam situasi tertentu, tidak semua bidang akan mendapat prioritas yang sama antara komunitas yang satu dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan komunitas.

Berdasarkan analisis hasil wawancara mendalam dan FGD, peneliti menemukan gambaran tentang berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI yang terdapat di FWBM. Berbagai program pemberdayaan tersebut setidaknya bisa dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu ekonomi, teknologi informasi komunikasi (TIK), hukum, dan mental-psikologis.

Dalam bidang ekonomi, FWBM menyadari perlunya dilakukan kegiatan-kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, FWBM telah dan masih melaksanakan beragam kegiatan diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, menjahit, membuat kue, keripik, produksi telur asin, bakso, *fried chicken*, dan lain sejenisnya. Salah satu terobosan yang berhasil dan kemudian menjadi kekuatan aktivisme FWBM yakni mendirikan Koperasi Serba Usaha Baitulmaal Wattamwil (BMT) Buruh Migran (Bumi) Sejahtera pada tahun 2015. Hingga kini koperasi tersebut masih berjalan. Tidak hanya melayani simpan-pinjam, koperasi ini juga mewadahi produk-produk olahan dari para anggotanya seperti kue, keripik, telur asin, dan lain sejenisnya. Di sini tampak suatu alternatif dari FWBM yang mengelaborasi konsep koperasi dengan mini-market untuk memasarkan berbagai produk dari purna-PMI, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

> "*Alhamdulillah, kalau koperasinya sampai detik ini saya pertahankan agar menjadi kekuatan kita […] bisa mengembangkan usaha. Koperasi kita bukan hanya simpan-pinjam tapi sudah merambah ke jual-beli dari produk-produk punya teman-teman mantan TKI dijual di koperasi*." (TH, 45 tahun, pegiat FWBM, Rabu 25 Agustus 2021).

Kehadiran koperasi ini memberikan dampak positif khususnya bagi para anggotanya dan umumnya masyarakat luas di sekitar. Mereka bisa sewaktu-waktu meminjam uang ke koperasi

pada saat mereka membutuhkan dana mendadak seperti untuk biaya pendidikan anak serta perawatan anak atau anggota keluarganya yang sakit. Selain itu, mereka dapat meminjam uang di koperasi untuk mengembangkan usaha, misalnya warung sembako. Beberapa informan menyatakan bahwa yang menjadi nilai tambah dari proses pinjaman di koperasi ini adalah mudah, tidak berbelit-belit, dan cepat. Hal ini dilandasi adanya rasa kepercayaan yang tinggi di antara anggota FWBM.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan pada bidang ekonomi adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan FWBM untuk merubah pola pikir para purna-PMI agar tetap mempunyai semangat dan jiwa kewirausahaan. Hal ini diakui oleh para pegiat FWBM bahwasanya semangat dan jiwa kewirausahaan para purna-PMI masih tergolong lemah. Artinya, bukan hanya persoalan modal usaha (uang) melainkan juga terkait dengan pola pikir (*mindset*). Dalam pandangan otokritiknya para pegiat FWBM mengungkapkan bahwa manakala pola pikir belum berubah (berjiwa wirausahawan) "yang tahan banting" maka seberapa pun besar modal usaha yang diberikan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usahanya. Temuan penelitian ini sejalan dengan kajian IOM dkk. (2021) yang mengungkapkan bahwa akses permodalan dan perubahan pola pikir dari purna-PMI itu sendiri diperlukan untuk mendukung kewirausahaan para purna-PMI.

Terkait pemberdayaan bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), FWBM awalnya hanya menggagas upaya untuk memupuk kepercayaan diri para anggotanya dengan cara melatih mereka supaya berani menceritakan pengalaman-pengalamannya dalam bentuk tulisan di media sosial (Facebook). Oleh karena itu, FWBM melakukan pelatihan menulis reportase sederhana dan memberikan pengetahuan bermedia sosial yang baik. Dari sinilah kemudian mereka cukup terampil untuk membagikan berbagai pengalamannya saat menjadi PMI, baik suka maupun duka, agar diketahui oleh masyarakat luas terutama di laman Facebook. Kemampuan tersebut juga digunakan oleh mereka pada saat membantu orang lain, dalam arti tidak hanya sesama purna-PMI tetapi juga non-PMI. Dapat dikatakan, FWBM membekali para anggotanya kemampuan mendasar untuk menggali data/informasi dan menuliskan kronologi dari sebuah permasalahan.

Penting juga digarisbawahi bahwa pada bulan September 2020 yang lalu telah dilaksanakan pelatihan *digital marketing* di FWBM. Pelatihan tersebut terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Pelatihan tersebut diberikan dalam rangka menjawab kebutuhan para anggota FWBM yang mayoritas sudah memiliki usaha produk-produk olahan tetapi masih menghadapi kendala pemasaran. Situasi ini diungkapkan oleh informan anggota FWBM sebagai berikut.

> "*Selain modal, kalau bisa jualan online bisa lebih luas lagi. Kayak kemarin saya bawa ke Yogja, dari dia berapa terus saya tawarin ke temen, saya titipkan ke warung temen, saya online [melalui WA saja] juga sampai ke Papua ke Bali saya kirimin.*" (RF, 38 tahun, anggota FWBM, peserta FGD, Minggu 19 September 2021).

Dalam pelatihan-pelatihan *digital marketing* semacam ini FWBM seringkali berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Unsoed Purwokerto, Universitas Amikom Yogyakarta, dinas-dinas terkait, dan komunitas wartawan/pers lokal Kabupaten Cilacap. Peserta pelatihan ini tidak hanya anggota FWBM, tetapi salah satu anggota keluarga juga diikutsertakan supaya mereka melek teknologi digital. Pengetahuan yang diberikan seperti penggunaan gawai, yang selain untuk komunikasi juga bisa untuk mengemas dan memasarkan produk usaha secara digital. Artinya, FWBM sudah menyadari bahwa praktik-praktik TIK sederhana semacam itu juga penting dalam proses pemberdayaan bagi para purna-PMI, terutama dalam mengakselerasi kewirausahaan para anggotanya. Hal ini sejalan dengan studi Wahyono dkk. (2019) dan Laksono dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa pelatihan di bidang TIK memiliki peranan penting dalam

proses pengembangan kewirausahaan di desa asal PMI, terutama untuk meningkatkan kemampuan digitalisasi pemasaran produk.

Selanjutnya, langkah awal FWBM dalam pemberdayaan di bidang hukum adalah melalui kegiatan diskam dalam melakukan sosialisasi atau edukasi para anggotanya mengenai berbagai kebijakan yang terkait dengan pelindungan (termasuk pemberdayaan) purna-PMI dan keluarganya. Edukasi tentang hukum ini membahas peraturan perundang-undangan mulai dari kebijakan tingkat pusat (seperti UU No. 18 Tahun 2017), tingkat daerah (seperti peraturan daerah Kabupaten Cilacap), sampai dengan di tingkat desa (seperti peraturan desa). Edukasi ini oleh FWBM dikenal dengan sebutan pelatihan paralegal. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif serta sensitivitas anggota FWBM terhadap implementasi dari berbagai kebijakan khususnya yang terkait dengan nasib para purna-PMI. Untuk kepentingan ini, FWBM menggandeng para advokat probono yaitu advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Para advokat probono ini antara lain dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Selain menjadi narasumber, para advokat tersebut sekaligus menjadi mentor para anggota FWBM melalui praktik-praktik pendampingan dan advokasi kasus hukum.

Dari semua upaya pemberdayaan hukum yang dilakukan, FWBM diharapkan tidak hanya mampu menangani permasalahan hukum yang menimpa para anggotanya ataupun keluarganya, tetapi juga menjadi paralegal bagi masyarakat luas di sekitarnya. Namun, FWBM selalu menekankan bahwa menjadi paralegal merupakan kerja sosial 'panggilan hati' dalam arti tanpa mengharapkan imbalan satu rupiah pun. Selain itu menjadi paralegal juga harus bertindak penuh kehati-hatian dengan tetap mengacu pada aturan/norma yang berlaku serta berkonsultasi dengan para advokat probono baik dari SBMI maupun LBH. Beberapa pegiat FWBM menyatakan bahwa pemberdayaan di bidang hukum telah cukup membuahkan hasil. Hal ini diindikasikan dari catatan FWBM dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa laporan kasus yang menimpa calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya cenderung terus menurun. Cahyani dkk. (2019) juga mengungkapkan bahwa paralegal FWBM berpartisipasi secara aktif dalam memberikan pendampingan dan advokasi kasus hukum. Mereka melakukan penyelesaian kasus di luar pengadilan atau nonlitigasi melalui mediasi dan negosiasi, yang berdampak pada penurunan jumlah kasus yang dialami oleh calon PMI/PMI/purna-PMI dan keluarganya.

Pendampingan dan advokasi hukum bagi para purna-PMI di FWBM juga dilakukan bersamaan dengan pendampingan mental-psikologisnya, seperti diungkapkan oleh para pegiat FWBM. Alasannya, mengingat permasalahan yang sering ditemui pada PMI umumnya adalah kekerasan fisik, gaji yang tidak dibayar serta tidak memiliki asuransi kesehatan. FWBM menyebutkan bahwa pernah menangani suatu kasus purna-PMI yang ketika pulang dari luar negeri tidak membawa apa-apa, yang melekat hanya baju yang dipakainya, dan dengan kondisi tidak bisa berjalan akibat dianiaya oleh majikannya. Singkatnya, permasalahan yang dialami bukan hanya pada kondisi fisik tetapi juga juga kesehatan mental-psikologis purna-PMI tersebut. Iqbal (2019) mengungkapkan bahwa ancaman stres dan gangguan psikologis PMI bisa berujung pada tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting dilakukan pemantauan dan pendampingan terkait dengan kesehatan mental-psikologis PMI, termasuk purna-PMI. Terkait hal itu, FWBM melakukan pemberdayaan di bidang mental-psikologis berupa upaya pengobatan dan rehabilitasi anggotanya baik secara fisik maupun mental-psikologis agar tetap semangat untuk bangkit menjalani kehidupan lagi. Pemberdayaan ini tentunya dengan melibatkan tenaga medis dan psikolog untuk memberikan pendampingan.

Hal lain yang dilakukan FWBM dalam pemberdayaan di bidang mental-psikologis adalah mengadakan kegiatan kebersamaan dan menciptakan suasana yang nyaman dengan melibatkan partisipasi para anggotanya. Dari kegiatan ini diharapkan kemudian muncul rasa memiliki (*sense of belonging*) dan ikut serta

bertanggung jawab bersama di dalam FWBM (*sense of community*), seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini.

> "*[di FWBM] Ada kegiatan yang untuk siraman rohani, pengajian. Seminggu sekali, tiap hari minggu. [FWBM] sebagai tempat kumpul, kita sharing, sebagai wadah kita untuk curhatanlah.*" (ST, 46 tahun, anggota FWBM, peserta FGD, Minggu 19 September 2021).

Dapat dikatakan bahwa FWBM merupakan "ruang/rumah bersama" untuk berbagi terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para anggotanya. Beberapa informan peserta FGD mengungkapkan bahwa secara psikologis ketika ada permasalahan yang diceritakan kepada "teman yang senasib-sepenanggungan" di FWBM, maka mereka akan merasa lega. Hal ini dikarenakan mereka akan mendapatkan tanggapan berupa masukan atau solusi atas permasalahannya. Hal ini sejalan dengan Yuniarto (2019) yang menyimpulkan bahwa komunitas pekerja migran sebagai bagian dari lembaga/organisasi pemberdayaan berperan sebagai "teman" untuk memberikan bantuan bagi anggotanya yang membutuhkan. Peran tersebut juga dapat dilihat sebagai "agen yang tidak terlihat" untuk membangun kesetiakawanan sosial dan kebersamaan.

Tantangan Keberlanjutan Program Pemberdayaan Komunitas Purna-PMI FWBM

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya kapasitas komunitas FWBM sebagai suatu organisasi berbasis komunitas lokal guna pelaksanaan pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal. Pada konteks ini, FWBM tentu perlu dijaga eksistensinya. Sebagaimana diketahui, FWBM secara 'resmi' dideklarasikan pada tahun 2011, tetapi sebetulnya praktik-praktik pemberdayaan komunitas purna-PMI di daerah asal di Kabupaten Cilacap telah dilakukan sejak tahun 2008. Kerja sama dengan Tifa *Foundation* pada tahun 2011 semakin meneguhkan Lakpesdam NU Kabupaten Cilacap melalui FWBM untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI. Kendatipun program kerja sama dengan Tifa *Foundation* sudah berakhir pada tahun 2014, berbagai bidang program pemberdayaan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Dalam perkembangan pengorganisasiannya, berbagai bidang program pemberdayaan komunitas purna-PMI FWBM di Desa Danasri Kidul tidak hanya dimotori oleh Lakpesdam, tetapi juga oleh Fatayat NU Kabupaten Cilacap. Tentunya dengan beragam bentuk penyesuaian program seiring kebutuhan dari para anggota FWBM itu sendiri.

Aktivisme FWBM dalam memberdayakan komunitas purna-PMI senantiasa berpijak pada kebutuhan para anggotanya "dari bawah" (*bottom-up*). Hal ini dapat memperkuat komitmen dan *ownership* terhadap program pemberdayaan tersebut, serta untuk keberlanjutan program bagi komunitas FWBM itu sendiri. Pada akhirnya, program pemberdayaan komunitas purna-PMI melalui FWBM dapat meningkatkan kualitas kehidupan para anggotanya menjadi lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera.

Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan komunitas purna-PMI, FWBM masih menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pegiat FWBM yang bersedia untuk menjadi relawan lapangan dalam arti bisa siap-sedia setiap waktu untuk mengelola dan mampu memfasilitasi pemecahan masalah para anggotanya. Kendala lainnya yaitu meskipun pada umumnya kegiatan pelatihan dalam program pemberdayaan tersebut tidak dipungut biaya, FWBM tetap harus menyiapkan dana swadaya untuk biaya operasional. Meskipun sudah ada iuran anggota, pada prinsipnya FWBM tidak ingin biaya operasional menjadi beban para anggotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh purna-PMI di daerah asal di Desa Danasri Kidul Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Hal ini mendorong FWBM yang diinisiasi dan dimotori oleh kader-kader NU

Kabupaten Cilacap (Lakpesdam dan Fatayat) pada tingkatan akar rumput–RT/RW/dusun– berupaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Adapun aktivisme FWBM dimanifestasikan dalam program pemberdayaan komunitas purna-PMI dan keluarganya.

Keberadaan FWBM menjadi penting dalam kapasitasnya sebagai organisasi berbasis komunitas lokal. Dengan pendekatan holistik, FWBM membantu purna-PMI dalam mengorganisasikan diri mereka sendiri (dan keluarganya), mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, menyusun perencanaan, dan pemecahan masalah/solusi bersama. Empat bidang program pemberdayaan di FWBM adalah ekonomi, TIK, hukum, dan mental-psikologis. Secara keseluruhan, pelaksanaan program pemberdayaan tersebut telah dan masih berjalan dengan baik, dalam arti meningkatkan kemampuan para purna-PMI dan keluarganya untuk memperbaiki kondisi atau kualitas kehidupannya agar bisa lebih berdaya, mandiri, dan sejahtera. Namun demikian, FWBM menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya SDM (relawan) dan finansial.

Penelitian ini membuktikan bahwa organisasi berbasis komunitas lokal memiliki kontribusi dan peranan yang penting dalam keberhasilan program pemberdayaan komunitas. Oleh karena itu, secara praktis, penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah (Kemnaker dan BP2MI) agar memprioritaskan organisasi berbasis komunitas lokal untuk bisa menjadi alternatif model pemberdayaan komunitas purna-PMI dan keluarganya di daerah asal. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemberdayaan tersebut meliputi pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi purna-PMI. Lebih jauh dari itu, FWBM tidak hanya melakukan pemberdayaan di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga melingkupi bidang TIK, hukum, dan mental-psikologis. Secara akademik, peneliti menyarankan penelitian selanjutnya menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Dengan demikian, peneliti terlibat dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan program pemberdayaan komunitas, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi. Melalui metode PRA, penelitian selanjutnya diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam sehingga dapat memperkaya analisis teoretis yang masih jarang dikaji, utamanya terkait dengan organisasi berbasis komunitas lokal dalam pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan *preliminary study* dari Tesis Rahmat Saleh (peneliti) yang dibimbing oleh Dr. Ricardi S. Adnan, M.Si. sebagai pembimbing pertama (promotor) dan Prof. Dr. Aswatini, M.A. sebagai pembimbing kedua (co-promotor). Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada para pembimbing tersebut atas segala sumbangsihnya. Terima kasih juga kepada Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (sekarang berubah menjadi Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora [IPSH] Badan Riset dan Inovasi Nasional [BRIN]) yang telah memberikan dukungan pendanaan penelitian ini melalui program beasiswa *Degree by Research*. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak, terutama para informan yang telah membantu dan berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi informasi/data terkait dengan penelitian ini.

PERNYATAAN *CONFLICTS OF INTEREST*

Kami menyatakan bahwa tidak ada *conflict of interest* sehubungan dengan penelitian, penulisan, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI

Dalam artikel ini, Rahmat Saleh berperan sebagai Kontributor Utama, sedangkan Ricardi S. Adnan dan Aswatini Raharto berperan sebagai Kontributor Anggota (pembimbing).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A., & Khan, A. (2015). Benefits of community-based organizations for community development. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 1(2), 39-43. https://doi.org/10.52155/ijpsat.v1.2.15

Andayani, F., & Pahlawan, I. (2017). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia tahun 2013-2015. JOM FISIP, 4(2), 1–9. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15242

BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2018). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2018. Pusat Data dan Informasi BP2MI. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_26-11-2019_data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf

BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2019). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2019. Pusat Data dan Informasi BP2MI. https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI__2019(2).pdf.

BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2020). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2020. Pusat Data dan Informasi BP2MI. https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan

BP2MI [Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia]. (2021). Data penempatan dan pelindungan PMI periode tahun 2021. Pusat Data dan Informasi BP2MI. https://bp2mi.go.id/statistik-penempatan

Bank Indonesia. (2021). Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia: Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menurut negara penempatan. https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf

Banks, N., & Hulme, D. (2012). The role of NGOs and civil society in development and poverty reduction (SSRN Scholarly Paper No. 2072157). https://doi.org/10.2139/ssrn.2072157

Cahyani, R. T., Al-Rasyid, M., & Rejekiningsih, T. (2019). Partisipasi paralegal dalam pendampingan hukum non litigasi bagi tenaga kerja Indonesia luar negeri (Studi pada Forum Warga Buruh Migran Nusawungu Kabupaten Cilacap). Jurnal PPKn, 7(2), 174–186. https://doi.org/10.2019/jppkn.v7i2.87

Chechetto-Salles, M. & Geyer, Y. (2006). Community-based organisation management, Handbook series for community-based organisations. Institute for Democracy in South Africa (IDASA).

Darmajanti, L. (2002). Kehidupan berorganisasi sebagai modal sosial komunitas Jakarta. Jurnal Masyarakat, 11, 62–88.

Dewayanti, R. (2010). Penguasaan tanah, migrasi internasional dan perubahan pedesaan. Jurnal Analisis Sosial, 15(2), 57–72. https://www.akatiga.org/wp-content/uploads/2021/02/JAS-Vol.-15-No.-2-2010.pdf

Dumi, A., Jahmurataj, I., Siagniliss, I., & Maze, D. (2014). The role of community-based organizations in management access and success of public administration development empirical analysis in front of Theory-Cal analysis. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(3), 457–466. https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n3p457

Ekawati, E. (2016). Nahdlatul Ulama (NU) sebagai civil society di Indonesia. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 13(2), 233–249. https://doi.org/10.19105/nuansa.v13i2.1098

Goldring, L. (2004). Family and collective remittances to Mexico: A multi-dimensional typology. Development and Change, 35(4), 799–840.

https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00380.x

Ife, J. & Tesoriero, F. (2016). Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation (3rd edition) (S. Manullang, N. Yakin, & M. Nursyahid, Penerjemah). Pustaka Pelajar. (Publikasi asli diterbitkan 2006).

IOM [International Organization for Migration], UNDP [United Nations Development Program], & SBMI [Serikat Buruh Migran Indonesia]. (2021). Memperkuat kapasitas desa dalam pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia: Praktik terbaik dan inklusi layanan selama pandemi COVID-19. IOM, UNDP, & SBMI.

Iqbal, M. (2019). Apakah pekerja migran Indonesia sehat mental? Jurnal Kajian Wilayah, 9(2), 65–82. https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.825

Kristanti, M. V. A. (2021). Jaringan Advokasi Transnasional (GAATW) dalam penyelesaian isu migrasi pekerja perempuan dan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Jurnal Hubungan Internasional, 14(1), 95–109. https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.20845

Kwok, C. H., Samah, A. A., Hashim, A. H., Redzuan, M., & Jaafar, W. M. W. (2015). Peranan organisasi berasaskan komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal. Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, 11(3), 53-60. http://journalarticle.ukm.my/9224/1/6x.geografia-mac15-kwok&asnarul-edam1.pdf

Laksono, A. T., Astuti, S. D., Widagdo, A., & Iswahyudi, S. (2021). Peningkatan kemampuan digitalisasi promosi dan pemasaran produk kelompok eks-buruh migran di Kabupaten Wonosobo. Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 17(1), 13–26. https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i1.2867

Levitt, P. & Lamba-Nieves, D. (2011). Social remittances revisited. Journal of Ethnic and Migration Studies, 37(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/1369183X.2011.521361

Mattessich, P. W. (2009). Social capital and community building. Dalam R. Phillips & R. H. Pitman (Ed.), An Introduction to Community Development (hlm. 49-57). Routledge.

Mentari, M. & Fatimah, N. (2021). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memberdayakan mantan buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo. Solidarity, 10(1), 76–85. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity/ article/view/48013

Migrant CARE. (2021, 23 Juni). Integrasi dan kontribusi pekerja migran dalam pembangunan. Presentasi disampaikan oleh Wahyu Susilo pada FGD Penyusunan Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Global Compact for Safe, Orderly & Regular Migration (GCM) IV, Klaster 3. Migrant CARE.

Neuman, W. L. (2007). Basic of social research: Qualitative and quantitative approaches (Second edition). Pearson Education, Inc.

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (Seventh edition). Pearson Education Limited.

Njuguna, S. N. (2013). The influence of community based organizations (CBOs) activities on economic empowerment of rural communities—A case of selected CBOs in Bahati division, Nakuru county. [Thesis, University of Nairobi]. http://erepository.uonbi.ac.ke/handle/11295/52379

Noveria, M., Romdiati, H., Aswatini, A., Latifa, A., Setiawan, B., Fitranita, F., Hidayati, I., & Saleh, R. (2021). Rencana Aksi Nasional (RAN) Implementasi Kesepakatan Global mengenai Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler (KGM) / Global Compact for Safe, Orderly, and

Regular Migration (GCM). Badan Riset dan Inovasi Nasional.

NU Online. (2018, 23 November). LAKPESDAM NU Cilacap berdayakan mantan pekerja migran dan keluarganya. https://www.nu.or.id/post/read/99423/lakpesdam-nu-cilacap-berdayakan-mantan-pekerja-migran-dan-keluarganya

Octaviani, L. (2015). Pemanfataan remitansi ekonomi dan sosial di kalangan buruh migran perempuan (Studi kasus: Desa Penggalang dan Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah). Forum Ilmu Sosial, 42(1), 57–59. https://doi.org/10.15294/fis.v42i1.9245

P4MI [Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia] Kabupaten Cilacap. (2020). Rekap data penempatan 2020. P4MI Kabupaten Cilacap.

Prihatiningsih, T. A. & Astuti, P. (2019). The role of Puspita Bahari as a community-based organization in empowering fisherman women (Study: Women fishermen in Morodemak Village, Bonang District, Demak Regency). Journal of Politic and Government Studies, 8(3), 401–410. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/24102

Raharto, A., & Noveria, M. (2012). Advocacy groups for Indonesian women migrant workers' protection. Jurnal Kependudukan Indonesia, 7(1), 1-17. https://doi.org/10.14203/jki.v7i1.80

Streeten, P. (1997). Nongovernmental organizations and development. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 554(1), 193–210. https://doi.org/10.1177/0002716297554001012

Suhartono, E. (2012). Model-model public private partnership pada sektor pelayanan air bersih. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 5(1),72-81. https://doi.org/10.20961/jab.v5i1.22

Sumardiani, F. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam melindungi hak Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Pandecta Research Law Journal, 9(2), 253-268. https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3579

UN-Habitat. (2008). Housing the poor in Asian cities, No 6: Community-based organizations: The poor as agents of development. United Nations. https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/3158

Wahyono, E., Kolopaking, L. M., Sumarti, T., & Hubeis, A. V. S. (2019). Jaringan digital dan pengembangan kewirausahaan sosial buruh migran perempuan. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 16(1), 57–76. https://doi.org/10.24002/jik.v16i1.1837

Wahyono, S. (2007). The problems of Indonesian migrant workers' rights protection in Malaysia. Jurnal Kependudukan Indonesia, 2(1), 27-44. https://doi.org/10.14203/jki.v2i1.139

Wahyudi, R., & Jusoh, H. (2016). Encouraging access to justice for Indonesian migrant workers in Malaysia: The need of engaging legal aid organizations in ASEAN. Scientific Journal of PPI-UKM, 3(3), 143–151. https://www.kemalapublisher.com/index.php/ppi-ukm/article/view/188

Windiasih, R., & Sugito, T. (2019). Forum Warga Buruh Migran (FWBM) sebagai media peningkatan partisipasi pemberdayaan perempuan. Prosiding Seminar Nasional: Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX, 19-20 November 2019. http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1149

Yuniarto, P. R., (2019). Migrant workers empowerment through vocational education and community-based learning: A study case of Indonesian in Taiwan. Journal of Indonesian Social Sciences and

Humanities (JISSH), 9(2), 113–129. http://dx.doi.org/10.14203/jissh.v9i2.151